

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2005, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2015, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasaid, M. Nur, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum acara perdata (teori dan praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soemardjono, Maria S.W., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutantio, Retno Wulan dan Winata, Iskandar Urip, 2005, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1991, *Pengertian Kepentingan Umum Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah*, Gema Clipping Service Hukum.

## **B. Artikel Jurnal**

Rahman, Phireri Muhammad Sabir, Paluaran, Delvi, Makmur, Andi Fauzan, “Analisis Terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata”, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1, November 2022.

Respationo, HM. Soerya, “Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum”, *Jurnal Hukum Yustisia*, No. 86 Th. XXII Mei-Agustus 2013.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei 2014.

Wuwungan, Gabriela Thalia, Rawis, Sanchia Darlene, Tirayoh, Z. Victorina, “Iptek Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyelesaian Piutang Negara oleh PUPN di KPKNL Manado”, *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, Vol. 02, No. 02, 2018.

## **C. Karya Ilmiah**

Pradana, Adytya Kusuma, 2018, “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Berkeadilan”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Sugiarto, “Problematika Hukum dalam Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Bagi Pengembangan Landas Pacu Bandar Udara Ahmad Yani Semarang”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, Tahun 2010.

Sutrisno, Melyani, “Penyelesaian Ganti Rugi atas Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatan Perkara Tanah (Studi Putusan Hakim Nomor 111/Pdt.G/2022/PN Jmb)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, 2023.

Wardani, Millati Hanifah, 2021, “Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Pada Pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (Berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum)”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syariah Hidayatullah, Jakarta.

#### D. Internet

“Jalan Tol Dikritik Hanya Dinikmati Orang Kaya” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/23/10404241/jalan-tol-dikritik-hanya-dinikmati-orang-kaya-ini-jawaban-presiden-jokowi>, diakses 18 April 2023.

“Tujuan dan Manfaat Penyelenggaraan Jalan Tol” dalam <https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/tujuan-dan-manfaat>, diakses 27 April 2023.

“Eksekusi” dalam <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi>, diakses 07 Maret 2024.

“Peninjauan Kembali Hingga 4 Kali” dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/tempuh-pk-hingga-4-kali--ingat-putusan-mk-ini-lt6313024eecffe/>, diakses 15 Maret 2024.

“Warga Terdampak Tol Serang-Panimbang Menjerit Tak Sanggup Kembalikan Uang Rp 4,6 M” dalam <https://www.bantennews.co.id/warga-terdampak-tol-serang-panimbang-menjerit-tak-sanggup-kembalikan-uang-rp46-m/>, diakses 27 Juli 2024.

“Pengurusan Piutang Negara Khusus” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12765/Pengurusan-Piutang-Negara-Khusus.html>, diakses 2 Agustus 2024.

“Mengenal PUPN” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15318/Mengenal-PUPN.html>, diakses 15 Agustus 2024.

“Prosedur Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15645/Prosedur-Pengurusan-Piutang-Negara-Oleh-Panitia-Urusan-Piutang-Negara>, diakses 24 Agustus 2024.

“Ekspektasi Peran Aktif Anggota PUPN dalam Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara” dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bontang/baca->

*artikel/13693/Ekspektasi-Peran-Aktif-Anggota-PUPN-Dalam-Penyelesaian-Pengurusan-Piutang-Negara*, diakses 27 Agustus 2024.

#### **E. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 1960-104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1225).

#### **F. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Srg Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt/2022 Perihal Penguatan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Srg.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 140 PK/Pdt/2023 Perihal Pembatalan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 160 K/Pdt/2022.